

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2015
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budhi Masturi, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT Pradnya Permata, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, edisi ketiga, 2001.
- Disiplin F Manao, *Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Kreasi Sahabat Bersama, Bandung, 2017.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Handry campbell black, *balck'k law dictionary*, west publishing, 1990.
- Haryatmoko, *Pelayanan Publik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2011.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010.
- Koentjoro Poerbopranoto, *Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan pengadilan administrasi*, Alumni, Bandung, 1985.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah Onrechtmatige Overheidsdaad Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Ni matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombutsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penangananannya oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum dan pembentukan pengadilan tata usaha negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000.

Sudikno Marto Kusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cet. Kedua Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Rafika Aditama, Bandung, 2015

## **Jurnal**

Ateng Syafrudin, “menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab”, jurnal pro justisia, edisi IV, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, ISSN 0215-7519, 2000.

Deszonda Rosiana Pattipawe, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, Jurnal SASI, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, ISSN 2614-2961, Vol. 25, No. 1, 2019

I Nyoman Suyatna, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal Kartha Patrika, Vol. 41 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, ISSN 2579-9487, 2019.

Nabila Fisrtia Izzati “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia”, Jurnal SASI, Jurnal SASI, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, ISSN 2614-2961, Vol 26 No.2, Edisi April 2020.

Setiajeng Kardasih, *Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, ISSN 2407-6562, 2010.

Yusnani Hajimzoen, *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 8, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, ISSN 2477-6238, hlm.195.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 *Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, LNRI No. 138 Tahun 2008, TLNRI Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*, LNRI Nomor 112 Tahun 2009, TLNRI Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LNRI Nomor 82 Tahun 2011, TLNRI Nomor 5234.

Peraturan Ombudsman RI No. 26 Tahun 2017 *tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan*.

Peraturan Ombudsman RI No. 31 Tahun 2018 *tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus*.

### **Sumber Lain**

Siaran Pers Ombudsman Nomor 030/HM.01/VII/2021, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-proses-alih-status-pegawai-kpk>, dengan Topik: Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam Proses Alih Status KPK.

<https://www.suara.com/news/2021/08/05/202058/13-poin-pimpinan-kpk-tolak-temuan-maladministrasi-tw-oleh-ombudsman-ri>.

Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum" <http://hukum.kompasiana.com>.